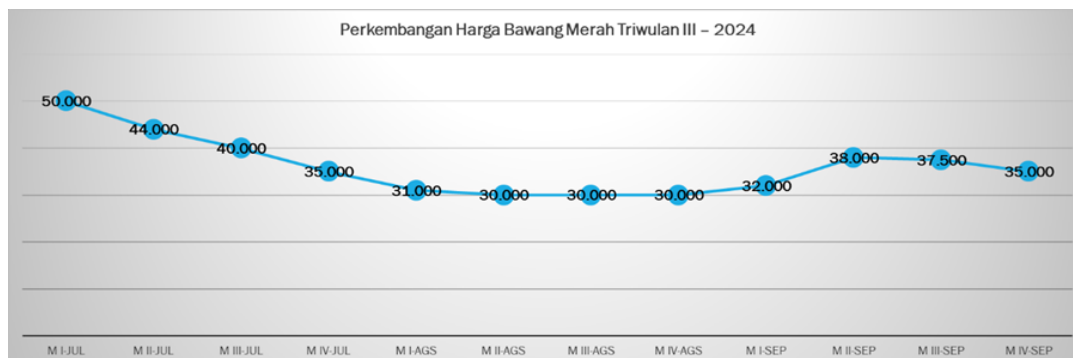


1. Perkembangan inflasi daerah dan atau perkembangan harga barang kebutuhan pokok dan penting, barang lainnya dan jasa serta risiko ke depan.

Laju inflasi Provinsi Gorontalo pada triwulan III-2024 sebesar 2,78% (yoy) lebih rendah dibandingkan pada triwulan II-2024 yang sebesar 3,93% (yoy). Saat ini inflasi Provinsi Gorontalo telah berada dalam target sasaran nasional sebesar $2,5\% \pm 1\%$. Capaian ini tidak lepas dari kontribusi seluruh anggota TPID provinsi/ kabupaten dan kota serta instansi vertikal terkait, seperti Bank Indonesia, Perum Bulog, dan BPS yang senantiasa mendukung program pengendalian inflasi di Provinsi Gorontalo.

Dalam rangka menjaga kestabilan inflasi daerah selama triwulan III-2024, TPID Provinsi Gorontalo senantiasa memfokuskan program-program pengendalian inflasi pada peningkatan kapasitas produksi guna meningkatkan ketersediaan pasokan bahan pangan dan komoditas-komoditas utama penyumbang inflasi serta melakukan stabilisasi dan monitoring perkembangan harga di pasar.

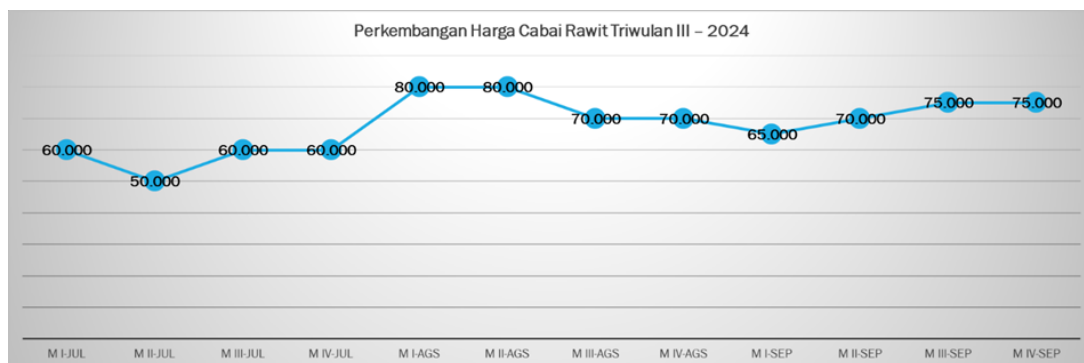
Berdasarkan data perkembangan harga pada Dinas Kumperindag Provinsi Gorontalo, harga Bawang merah pada minggu pertama bulan Juli 2024 sebesar Rp 50.000/kg, kemudian mengalami penurunan setiap minggunya pada kisaran harga Rp 30.000/kg. Namun pada Minggu ke dua bulan September 2024 harga Bawang merah mengalami kenaikan menjadi dengan Rp 38.000/kg. Kenaikan harga Bawang Merah disebabkan karena berkurangnya pasokan dari Bima, NTB.



Berdasarkan data PIHPS Bank Indonesia, pasokan bawang merah Provinsi Gorontalo pada September mengalami penurunan sebesar 37,91% sebagaimana terlihat dalam grafik di bawah.

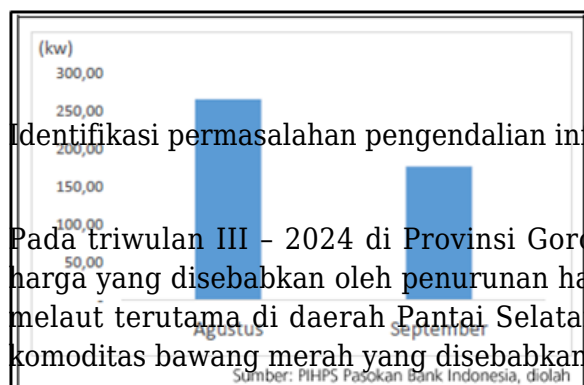
Pasokan Bawang Merah

Komoditas tomat, beras, dan cabai rawit mengalami penurunan harga. Penurunan harga tersebut disebabkan oleh meningkatnya pasokan seiring dengan panen yang dilakukan oleh peteni di Kabupaten Gorontalo, Kabupaten Boalemo, dan Kabupaten Bone Bolango. Hal tersebut dapat dilihat pada informasi harga dari Dinas Kumperindag Provinsi Gorontalo. Pada minggu pertama bulan Agustus harga cabai rawit menembus Rp 80.000/kg kemudian mengalami penurunan pada level harga sekitar Rp 70.000 - Rp 60.000/ kg.



Risiko ke depan adalah Provinsi Gorontalo diperkirakan akan mengalami inflasi secara bulanan. Perkembangan ini dipengaruhi oleh kenaikan harga beras yang disebabkan oleh berkurangnya pasokan seiring dengan tanaman padi yang baru memasuki masa tanam. Harga bawang merah diperkirakan masih mengalami kenaikan disebabkan berkurangnya pasokan yang berasal dari luar daerah seiring dengan berakhirnya masa panen. Inflasi yang lebih tinggi diperkirakan tertahan oleh penurunan harga cabai rawit dan tomat seiring dengan panen dari petani lokal.

2. Identifikasi permasalahan pengendalian inflasi di daerah.



Pada triwulan III - 2024 di Provinsi Gorontalo, komoditas ikan segar mengalami kenaikan harga yang disebabkan oleh penurunan hasil tangkap seiring dengan berkurangnya frekuensi melaut terutama di daerah Pantai Selatan Gorontalo. Selain itu kenaikan juga terjadi pada komoditas bawang merah yang disebabkan oleh berkurangnya pasokan dari Bima, NTB.

Namun demikian inflasi lebih tinggi tertahan oleh deflasi pada komoditas tomat, beras, dan cabai rawit. Penurunan harga tersebut disebabkan oleh meningkatnya pasokan seiring dengan

panen yang dilakukan oleh peteni di Kabupaten Gorontalo, Kabupaten Boalemo, dan Kabupaten Bone Bolango. Perkembangan harga cabai rawit bulan berikutnya diperkirakan masih akan mengalami penurunan seiring dengan melimpahnya pasokan.

3. Pelaksanaan kebijakan pengendalian inflasi di daerah.

Pelaksanaan kebijakan pengendalian inflasi di Provinsi Gorontalo pada Triwulan III-2024 sebagai berikut:

- Keterjangkauan Harga
 1. Pasar Murah/Gerakan Pangan Murah
 2. Giat sidak pasar yang dilaksanakan oleh Pemda Pohuwato
- Ketersediaan Pasokan
 1. Gerakan menanam padi gogoh di Kabupaten Pohuwato
 2. Penyaluran Benih Jagung Varietas sebanyak 1500 kg
 3. Panen padi gogoh di Kabupaten Pohuwato
 4. Penyaluran bantuan pupuk organik
 5. Pengadaan pompanisasi 90 unit di Kabupaten Bone Bolango
 6. Penandatanganan KAD GTG Provinsi Gorontalo dan Provinsi Sulawesi Barat
 7. Pelaksanaan Program Gerakan Tanam GEMA KAKANDA di Kabupaten Bone Bolango
- Kelancaran Distribusi

Pelaksanaan penyaluran BBM Gratis kepada pengemudi bentor di Kawasan Pasae Tradisional di 5 Kecamatan dengan total penerima bantuan sebanyak 445 orang @Rp420.000

- Komunikasi Efektif
 1. Pelaksanaan Rakor TPIP-TPID wilayah Sulampua dengan tema “Memperkuat Sinergi dalam Menjaga Stabilitas Pasokan dan Distribusi Pangan”
 2. Diskusi kemitraan Agribisnis Provinsi Gorontalo Bersama Kemenko Perekonomian membahas terkait *piloting closed loop* pertanian hortikultura di klister.

4. Evaluasi kebijakan pengendalian inflasi di daerah.

Evaluasi kebijakan pengendalian inflasi di Provinsi Gorontalo pada triwulan III – 2024 adalah program dan kebijakan yang dilakukan untuk mengatasi permasalahan harga, pasokan dan distribusi untuk komoditas yang mengalami kenaikan harga. Pemerintah Provinsi Gorontalo dalam mengatasi permasalahan harga, pasokan dan distribusi khususnya komoditi beras, cabai rawit, bawang merah telah melakukan upaya pengendalian inflasi di kabupaten/kota, yaitu dengan melaksanakan pasar murah bersubsidi, Gerakan Pangan Murah, Gerakan menanam di kabupaten/kota, pengadaan pompanisasi 90 unit, penyaluran bantuan pupuk organik ke 15 kelompok tani, penyaluran benih jagung dengan luasan 100 Ha. Selain itu telah dilakukan panen Padi Gogoh hasil dari Gertam di Kecamatan Popayato Barat sebanyak 1,2 ton.

Namun demikian, ketidakpastian global masih membayangi optimism pemulihan ekonomi dan pengendalian inflasi. Dampak ketidakpastian global akibat ketegangan geopolitik di Laut Merah diperkirakan dapat mendorong biaya ongkos logistik barang ekspor-impor hingga 40%.

Dalam pelaksanaan kegiatan pengendalian inflasi terdapat beberapa ruang untuk

pengembangan ke depan seperti meningkatkan pemanfaatan Pusat Informasi Harga Pangan Strategis (PIHPS) yang lebih optimal, *Early Warning System* (EWS) Inflasi, pelaksanaan rapat teknis untuk memantau dan menjaga ketersediaan pangan, inspeksi mendadak (sidak) pada kebutuhan pangan strategis, dan penyediaan pangan dengan harga terjangkau melalui pasar murah/Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan (SPHP) bersama Bulog, Perencanaan program lanjutan Kerja sama Antar Daerah (KAD) yaitu KAD *Government to Government* (G2G) antara Pemerintah Provinsi Gorontalo dan Pemerintah Provinsi Sulawesi Barat yang bertujuan sebagai upaya pengendalian inflasi daerah terhadap komoditas strategis penyumbang inflasi yang dilakukan melalui kerangka 4K (ketersediaan pasokan, keterjangkauan harga, kelancaran distribusi, dan komunikasi efektif), secara aktif melakukan pemantauan ketersediaan dan harga sembako khususnya untuk komoditas penyumbang inflasi, menghimbau masyarakat untuk belanja bijak.

5. Rekomendasi kebijakan pengendalian inflasi di daerah.

Rekomendasi kebijakan pengendalian inflasi di Provinsi Gorontalo pada Triwulan III 2024:

- Ketersediaan Pasokan
 1. Memastikan ketersediaan pasokan beras, bawang merah dan cabai rawit khususnya menjelang HBKN Natal dan Tahun Baru 2025. Ditindaklanjuti melalui penguatan koordinasi antara Bank Indonesia, OPD, dan Bulog untuk pengawasan kelancaran pasokan dan stok bersama dengan Satgas Pangan, bersinergi dalam SPHP bersama Perum Bulog atau pasar murah bersubsidi bersama OPD khususnya untuk komoditas minyak goreng, gula pasir, beras, cabai rawit, dan bawang merah serta melakukan pemantauan harga dan saling berkoordinasi antar Pemda Kabupaten/Kota untuk memastikan pasokan di wilayah koordinasi masing-masing.
- Keterjangkauan Harga
 1. Menghadapi HBKN Natal dan Tahun Baru 2025, diharapkan kepada Bupati/Walikota dan seluruh pihak untuk terus secara masif melaksanakan pasar murah dan Gerakan Pangan Murah di masing-masing wilayahnya dengan komoditas penyumbang inflasi.
- Kelancaran Distribusi
 1. Menindaklanjuti dengan segera kerja sama antar daerah (KAD) untuk mendukung distribusi bahan pokok dari luar daerah ke dalam provinsi.
- Komunikasi Efektif
 1. Mendorong peran aktif TPID di daerah; tidak hanya dalam rangka pengendalian inflasi namun juga untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi dan daya beli masyarakat melalui strategi 4K sesuai arahan presiden pada Rakornas TPIP-TPID. Ditindaklanjuti melalui intensifikasi pelaksanaan pasar murah untuk mendorong daya beli masyarakat. Kegiatan ini akan dilaksanakan untuk komoditas strategis pemicu inflasi seperti: BARITO (bawang, rica, tomat), beras, minyak goreng dan sembako lainnya oleh Dinas Terkait (Dinas Ketahanan Pangan dan Diskumperindag) serta Kerjasama Perum Bulog Gorontalo.
 2. Mendorong TPID Provinsi dan Kab/Kota untuk terus memantau pergerakan harga serta persediaan Beras, Cabai Rawit, Bawang Merah, dan minyak goreng di level distributor dan konsumen serta pengawasan tata niaga sesuai dengan aturan yang ditetapkan pemerintah. Ditindaklanjuti dengan pelaksanaan pemantauan harga setiap hari melalui Early Warning System (EWS) Pemda yang sumber datanya dari data PIHPS Bank Indonesia.
 3. Diharapkan Pemerintah Kabupaten/Kota secara aktif melakukan pemantauan

ketersediaan dan harga sembako khususnya untuk komoditas penyumbang inflasi.

4. Diharapkan kepada Pemerintah Kabupaten/Kota menghimbau masyarakat untuk belanja bijak terutama menjelang HBKN Natal dan Tahun Baru 2025.